

**PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN OLEH KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI
RIAU TERHADAP PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA
JASA OLEH NOTARISDI KABUPATEN KAMPAR**

TESIS



Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas

OLEH:

SUDARTO PARDEDE

2120123001

Pembimbing:

- 1. Dr. Rembrant, SH.,M.Pd**
- 2. Dr. Yussy Adelina Mannas, SH.,MH**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN OLEH KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI RIAU
TERHADAP PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA
OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KAMPAR**

(Sudarto Pardede, 2120123001, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 114 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ), diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut di atas, Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan berkewajiban untuk menerapkan PMPJ bagi pengguna jasa Notaris. Penelitian ini akan mengkaji penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar dan tindak lanjut dari hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan PMPJ oleh Notaris Kabupaten Kampar terhadap pengguna jasa belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari 119 jumlah Notaris Kabupaten Kampar, 15 orang Notaris terindikasi berisiko tinggi karena tidak menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Notaris tersebut dilakukan audit kepatuhan langsung (*on-site*) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar. Tindak lanjut hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar, yaitu Notaris Kabupaten Kampar harus melaksanakan komitmen untuk menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga disampaikan informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris terkait serta informasi hasil pengawasan kepada PPATK, dan PPATK akan melakukan pemantauan terhadap Notaris terkait.

Kata kunci: Pelaksanaan Audit, Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, dan Notaris.

**IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE AUDIT BY THE REGIONAL
OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS RIAU
PROVINCE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF
RECOGNIZING SERVICE USERS BY NOTARY IN KAMPAR DISTRICT**

(Sudarto Pardede, 2120123001, *Notarial Master Program, Faculty of Law,
Andalas University, 114 Pages, 2024*)

ABSTRACT

The Principle of Recognizing Service Users (PMPJ), is regulated in Article 18 of Law Number 8 of 2010. This is then followed up with Government Regulation Number 43 of 2015, which is implemented by Minister of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2017. Based on statutory regulations the law above, the Notary is one of the Reporting Parties in the prevention and eradication of TPPU and is obliged to implement PMPJ for users of Notary services. This research will examine the application of the principle of recognizing service users by Notaries in Kampar Regency and follow-up on the results of a compliance audit by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Riau Province on the application of the principle of recognizing service users by Notaries in Kampar Regency. The research method used is empirical juridical, with purposive sampling technique. The results of the study show that the application of PMPJ by the Notary of Kampar Regency to service users has not been implemented optimally. This can be seen from the 119 Notaries in Kampar Regency, 15 Notaries who are indicated to be at high risk because they do not implement PMPJ as stipulated in the laws and regulations, so that the Notaries are subject to direct (on-site) compliance audits by the Regional Office of the Ministry of Law and Rights. Human Rights in collaboration with the Regional Notary Supervisory Board of Kampar Regency. Follow-up on the results of the compliance audit by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Riau Province regarding the Implementation of PMPJ by Notaries in Kampar Regency, namely the Notary of Kampar Regency must carry out the commitment to implement PMPJ as mutually agreed upon. In addition, information on the results of compliance monitoring and guidance letters was also conveyed to the relevant Notary as well as information on the results of supervision to PPATK, and PPATK will carry out monitoring of the related Notary.

Keywords: Audit Implementation, Application of the Principle of Recognizing Service Users, and Notary Public.